

PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL PADA UMKM DI LABUAN BAJO

Chintia Mila Putri¹, Emerensiana Nirma², Arsy Ash Sihddiqi³, March Sella Romaulina⁴
Universitas Bina Sarana Informatika ¹²³⁴, Jakarta Timur, Indonesia

63220967@bsi.ac.id¹, 63220827@bsi.ac.id², 63220954@bsi.ac.id³, 63220974@bsi.ac.id⁴

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 2 No : 5 Mei 2025 Halaman : 43-51	Digital transformation is a key element in enhancing the competitiveness and sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the era of Industry 4.0. This study aims to analyze the role of local government in encouraging digital transformation among MSMEs in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and document studies involving MSME actors and related government agencies. The results show that the local government plays a strategic role in providing digital infrastructure, digital skills training, and creating policies that support technological inclusion for MSMEs. Although various efforts have been made, challenges such as limited internet access, low digital literacy, and lack of technical assistance remain the main obstacles. Therefore, synergy between local government, the private sector, and local communities is crucial to accelerating a sustainable digital transformation process.
Keywords: MSMEs, digital transformation, local government, economic empowerment	

Abstrak

Transformasi digital merupakan elemen kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital pada UMKM di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, serta menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi teknologi pada UMKM. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pendampingan teknis masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam mempercepat proses transformasi digital yang berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, transformasi digital, pemerintah daerah, pemberdayaan ekonomi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), pada tahun 2023, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 66 juta, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61%, setara Rp9.580 triliun di tahun tersebut. UMKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja. Data pertumbuhan pelaku UMKM dalam 5 tahun terakhir menggambarkan perubahan yang fluktuatif, mulai dari 2018 yang mencatatkan total keseluruhan sebesar 64,19 juta, diikuti oleh kenaikan di tahun 2019 yang mencapai 65,47 juta. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah UMKM menjadi 64 juta, diikuti kenaikan

pada tahun berikutnya menjadi 65,46 juta usaha. Jumlahnya kembali turun pada 2022 menjadi 65 juta. Terakhir data tahun 2023 mencatatkan kenaikan dengan total 66 juta pelaku UMKM (Fauzan ,M.2025). Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam hal transformasi digital, di mana sekitar 64% pelaku UMKM belum memiliki kompetensi digital yang memadai .

Di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), sektor UMKM memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian lokal. Sejak Agustus 2021 hingga Mei 2024, tercatat sebanyak 4.642 pelaku usaha telah mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS), dengan 97,6% di antaranya merupakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Hamid, 2024).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dengan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2023). Hal ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi yang harus terus diberdayakan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang semakin berkembang pesat (Muhyiddin Nashir et al., 2025).

Transformasi digital telah menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Di era ekonomi digital, UMKM menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam pembelian produk. Labuan Bajo, sebagai destinasi pariwisata, menawarkan peluang besar bagi UMKM lokal untuk memanfaatkan transformasi digital guna meningkatkan penjualan produk mereka. Dengan mengintegrasikan teknologi digital seperti e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital, UMKM di Labuan Bajo dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi ekonomi digital di banyak negara, termasuk Indonesia. Perekonomian menawarkan peluang baru bagi pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan produktivitas dan pangsa pasar mereka diseluruh dunia. Namun dalam konteks Indonesia, banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan besar dalam pemanfaatan ekonomi digital dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital. Rendahnya literasi dan kemahiran digital, terbatasnya akses terhadap infrastruktur teknologi, dan tingginya biaya adopsi teknologi menjadi kendala utama bagi UMKM untuk menjalani transformasi digital

Beberapa pelaku UMKM di Labuan Bajo, Manggarai Barat makin hari semakin berkembang pesat. Salah satunya didominasi oleh potensi industri pangan dan kerajinan souvenir. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah mengadakan Gerakan 100 Ribu UMKM Online Nasional tahun 2017. Faktor transportasi saat ini menjadi kendala pengembangan UMKM di Labuan Bajo. Pemasaran produk UMKM secara onlineterhambat oleh beberapa faktor. Misalnya, tidak semua orang gemar memanfaatkan internet, banyak yang tidak paham istilah-istilah yang digunakan di dunia online, atau kurangnya sinyal.

Digitalisasi memberikan berbagai manfaat bagi UMKM di Labuan Bajo. Selain mempermudah akses ke pasar global, teknologi digital juga memungkinkan peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan bisnis. Melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, serta media sosial seperti Instagram dan Facebook, UMKM dapat mempromosikan produk khas mereka secara lebih efektif kepada wisatawan yang berkunjung maupun konsumen dari luar daerah. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga memperkuat citra merek lokal sebagai bagian dari daya tarik pariwisata Labuan Bajo.

Namun, di tengah pesatnya perkembangan pariwisata, pelaku UMKM di Labuan Bajo menghadapi tantangan besar dalam hal pemasaran, efisiensi operasional, dan perluasan pasar, khususnya di era digital saat ini. Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM mampu bersaing, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun global (Petrus Suhardi Ekaputra, 2024)). UMKM, seperti pemanfaatan e-marketplace, media sosial, dan teknologi pembayaran digital (misalnya QRIS), terbukti dapat memperluas akses pasar

dan meningkatkan efisiensi transaksi. Namun, implementasi transformasi digital di Labuan Bajo masih menemui kendala berupa keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta akses internet yang belum merata.

Peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan dan pendidikan menjadi prioritas utama untuk memastikan UMKM bisa beroperasi secara lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Selain itu, peningkatan akses ke modal dan pasar sangat penting yang bisa dicapai melalui kerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah. Selain itu, penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dan memperluas jangkauan pasar dengan mengoptimalkan pemasaran digital (Zulham Adamy, Dkk, 2025)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang peran strategis dari pemerintah daerah dan hambatan-hambatan bagi pelaku UMKM serta solusi dalam proses digitalisasi UMKM di kawasan destinasi wisata Labuan Bajo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Transformasi Digital Pada UMKM Di Labuan Bajo. Fokus studi kasus memberikan ruang untuk mengeksplorasi secara komprehensif konteks lokal, tantangan yang dihadapi, serta respons para pemangku kepentingan terkait peran pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dan pelaku UMKM di Labuan Bajo. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai artikel, dan jurnal ilmiah, yang membahas tentang peran pemerintah daerah dalam transformasi digital UMKM, khususnya di Labuan Bajo. Peneliti melakukan pencarian literatur secara sistematis melalui internet untuk memperoleh referensi yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disintesis untuk membangun kerangka teori serta mendukung pembahasan hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Transformasi Digital Pada UMKM Di Labuan Bajo

Pemerintah daerah Labuan Bajo berperan aktif dalam mendorong transformasi digital pada UMKM, terutama sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan destinasi pariwisata super premium. Pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, berperan dalam mendorong transformasi digital UMKM melalui kebijakan fasilitasi infrastruktur, edukasi, pendampingan, dan kemitraan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM lokal, memperluas akses pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata. Pemerintah daerah Labuan Bajo secara aktif mendukung transformasi digital UMKM melalui berbagai program, dan kolaborasi lintas sektor. Berikut bentuk dukungan yang dilakukan:

1. Literasi Digital dan Pelatihan UMKM.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Manggarai Barat bekerja sama dengan Kementerian Kominfo menyelenggarakan program "Gali Ilmu Literasi Digital" yang menasar pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital bagi pelaku usaha lokal. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Komodo dan Bolong, dengan partisipasi ratusan peserta.

2. Pengembangan Platform Digital Lokal.

Pemerintah daerah mendukung pengembangan platform digital seperti "MABAR Smart," hasil kolaborasi dengan BINUS University. Aplikasi ini memiliki tiga menu utama: Pariwisata, Pengaduan, dan UMKM, yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital lokal dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional

3. Fasilitasi Akses Pasar dan Pembayaran Digital

Pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah (Perumda) Bidadari mengembangkan ekosistem pemasaran terpadu, termasuk platform daring seperti "Mbaru Dami," untuk membantu UMKM memasarkan produk mereka secara online. Selain itu, pelatihan penggunaan QRIS juga diberikan untuk memfasilitasi transaksi non-tunai.

4. Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Lain

Pemerintah daerah berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), yang mencakup pelatihan pemasaran daring dan peningkatan kualitas layanan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata.

5. Dukungan Pembiayaan dan Pendampingan

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Labuan Bajo memberikan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman komersial kepada UMKM. Selain itu, BRI juga memberikan pelatihan literasi digital dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.

Adapun beberapa kebijakan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah daerah untuk mendorong digitalisasi UMKM di Labuan Bajo meliputi:

- 1. Program Onboarding Digital:** Pemerintah daerah, didukung pemerintah pusat, menargetkan peningkatan jumlah UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital, dengan target nasional 30 juta UMKM pada 2024. Program ini mendorong UMKM untuk mulai memasarkan produk secara online melalui e-marketplace dan platform digital lainnya
- 2. Kemitraan dengan Swasta dan Lembaga Pendidikan:** Pemerintah daerah menggandeng perusahaan teknologi seperti Grab dalam program "Kota Masa Depan" yang fokus pada edukasi dan literasi digital UMKM, serta bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti UPN Veteran Yogyakarta untuk pelatihan transformasi digital.
- 3. Pengembangan E-Marketplace Lokal:** Pemerintah daerah memfasilitasi pembuatan e-marketplace terpadu yang dikelola oleh pemerintah atau komunitas lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM khas Labuan Bajo.
- 4. Workshop dan Pelatihan Rutin:** Dinas terkait secara rutin mengadakan workshop digitalisasi UMKM, menghadirkan narasumber dari pemerintah, komunitas digital, dan pelaku industri kreatif untuk membekali UMKM dengan keterampilan digital terbaru

Tantangan yang dihadapi UMKM di Labuan Bajo dalam proses transformasi digital

sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mulai bertransformasi menjadi digitalisasi, Namun di Labuan Bajo sendiri berdasarkan data dari Asosiasi UMKM Akunitas Labuan Bajo

dari 100 Pelaku Usaha atau UMKM yang aktif dan terdaftar dalam Asosiasi ini hanya 50% yang sudah bertransformasi ke era digitalisasi atau memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional bisnis. Tantangan yang dihadapi UMKM di Labuan Bajo dalam proses transformasi digital meliputi:

1. Keterbatasan skill dan kemampuan literasi digital pelaku UMKM.

Saat ini, digitalisasi ekonomi digital di sektor informal menjadi sangat penting. Pemanfaatan ekonomi digital menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam memasarkan produk secara digital, UMKM harus mampu menguasai strategi digital marketing dan memiliki konten kreatif. Digitalisasi UMKM memberikan banyak manfaat, antara lain membantu pemasaran produk secara meluas, mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan melalui penggunaan platform pembayaran digital, serta meningkatkan akses pasar dan pelatihan pengembangan usaha.

Labuan Bajo dengan keterampilan dan pemahaman yang kurang memadai tentang teknologi digital. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan platform digital secara efektif dalam pemasaran dan operasional bisnis. Lebih dari sekadar mengembangkan pemasaran online untuk memperluas pangsa pasar, yang dimaksud dengan digitalisasi UMKM sesungguhnya tidak hanya menyangkut aspek pemasaran. Namun, perlu pula memperhatikan aspek operasional usaha, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan barang, dan manajemen pesanan. Kemampuan literasi digital pelaku UMKM dibutuhkan agar sebagai sebuah sistem usaha, UMKM tidak lagi gagap ketika harus bersaing dan masuk dalam ekosistem digital yang menjadi bagian dari Revolusi Industri 4.0. Di Indonesia, keterampilan serta tingkat adopsi teknologi masih menjadi tantangan utama dalam digitalisasi ekonomi UMKM.

2. Literasi dan Inklusi Keuangan Digital yang Rendah

Transformasi UMKM ke digital menjadi penting dalam mendorong produktivitas, pengembangan maupun pemulihan ekonomi kedepan. Selain literasi digital secara umum, tingkat pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan digital juga masih rendah di kalangan UMKM. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengadopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS dan memanfaatkan layanan perbankan online lainnya.

3. Keterbatasan Infrastruktur Internet

Keterbatasan akses internet dan rendahnya pemahaman teknologi menjadi kendala signifikan dalam penerapannya secara lebih luas. Akses infrastruktur internet yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan, menjadi kendala signifikan bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Keterbatasan ini menghambat adopsi teknologi dan pemanfaatan platform online untuk pemasaran dan penjualan

4. Kurangnya Kesadaran Konsumen

Beberapa konsumen mungkin belum terbiasa atau percaya dalam menggunakan platform digital, yang dapat mengurangi adopsi teknologi oleh UMKM

5. Tantangan dalam Pemasaran Digital

UMKM perlu menguasai strategi pemasaran digital dan membuat konten yang kreatif agar berhasil memasarkan produk secara online. Mereka juga harus tepat dalam memilih platform media yang sesuai dengan target pasar

Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Keberhasilan Transformasi Digital UMKM Di Labuan Bajo

Keberhasilan transformasi digital UMKM di Labuan Bajo sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengatasi hambatan seperti literasi dan infrastruktur digital yang terbatas, modal, serta regulasi yang kompleks. Sementara itu, dukungan pemerintah, kolaborasi dengan industri digital, dan pemanfaatan platform e-commerce menjadi faktor pendorong utama yang dapat mempercepat transformasi digital UMKM di daerah ini. Namun, dalam meningkatkan Keberhasilan transformasi digital UMKM di Labuan Bajo sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengatasi hambatan seperti:

- Rendahnya literasi digital. Banyak pelaku UMKM di Labuan Bajo belum memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai tentang teknologi digital, sehingga sulit mengoptimalkan penggunaan platform digital untuk pemasaran dan operasional bisnis
- Keterbatasan Infrastruktur Digital. Akses internet yang belum merata dan kualitas jaringan yang kurang memadai di beberapa wilayah menghambat UMKM dalam mengadopsi teknologi digital secara optimal.
- Keterbatasan Modal dan Dukungan Finansial. UMKM masih banyak yang bergantung pada modal pribadi dan belum mendapatkan dukungan finansial yang cukup dari pemerintah atau lembaga keuangan untuk investasi teknologi digital.
- Persepsi Risiko dan Ketidaksiapan Pasar Online. Sebagian pelaku UMKM merasa ragu dan kurang siap memasuki pasar digital karena kekhawatiran terhadap keamanan transaksi dan ketidakpastian pasar online.
- Kendala Regulasi dan Perizinan. Proses perizinan yang rumit dan birokrasi menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang dan melakukan ekspansi, termasuk dalam digitalisasi usaha.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia. SDM yang terbatas, baik dari segi keterampilan digital maupun kemampuan produksi, membatasi kemampuan UMKM dalam mengelola transformasi digital secara efektif.
- Ketergantungan pada Sektor Pariwisata. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pariwisata membuat UMKM rentan terhadap fluktuasi jumlah wisatawan, sehingga berdampak pada stabilitas pemasaran digital mereka.

Sementara itu, dukungan pemerintah, kolaborasi dengan industri digital, dan pemanfaatan platform e-commerce menjadi faktor pendorong utama yang dapat mempercepat transformasi digital UMKM di daerah ini.

Dampak Transformasi Digital Terhadap Peningkatan UMKM Di Labuan Bajo Setelah Adanya Intervensi Pemerintah Daerah.

Transformasi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan UMKM di Labuan Bajo setelah adanya intervensi dari pemerintah daerah. Salah satu dampak utama adalah perluasan akses pasar, di mana UMKM kini mampu menjangkau konsumen tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan internasional melalui platform e-commerce dan etalase digital. Hal ini secara langsung meningkatkan peluang penjualan dan pertumbuhan usaha. Selain itu, digitalisasi turut meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Melalui pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), pelaku UMKM semakin mampu menguasai teknik pemasaran digital, inovasi produk, serta pengelolaan bisnis yang adaptif terhadap era digital (Society 5.0). Transformasi digital juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, ketika UMKM menghadapi keterbatasan pemasaran konvensional akibat

menurunnya jumlah wisatawan. Dengan beralih ke pemasaran online, UMKM dapat mempertahankan kelangsungan usaha dan mempercepat pemulihan ekonomi lokal.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudahan akses pasar dan sistem pembayaran digital seperti QRIS mempermudah transaksi, sehingga pendapatan pelaku UMKM meningkat. Transformasi digital juga memperkuat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo, di mana produk lokal menjadi bagian integral dari pengalaman wisatawan, mendukung branding destinasi super prioritas ini. Selain itu, program-program seperti Floratama Academy yang digagas BPOLBF telah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia UMKM dalam hal negosiasi, akses permodalan, inovasi, dan pengembangan model bisnis berbasis digital. Dengan demikian, intervensi pemerintah daerah melalui digitalisasi UMKM tidak hanya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata unggulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian literatur, peneliti menyimpulkan bahwa, peran pemerintah daerah sangat vital dalam mendorong transformasi digital pada UMKM di Labuan Bajo, salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional. Pemerintah daerah telah mengambil berbagai langkah strategis, mulai dari penyediaan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan teknologi, hingga kebijakan yang mendukung inklusi digital bagi pelaku UMKM. Upaya ini terbukti memberikan dampak positif, seperti peningkatan akses pasar, efisiensi operasional, serta penguatan daya saing produk lokal baik di tingkat nasional maupun internasional.

Transformasi digital pada UMKM di Labuan Bajo tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata unggulan. Melalui pemanfaatan e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran digital, UMKM mampu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan visibilitas produk, dan memudahkan transaksi dengan wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, digitalisasi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan pelatihan, sehingga UMKM dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di era digital.

Namun, proses transformasi digital ini masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, minimnya pendampingan teknis, dan kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM di Labuan Bajo. Selain itu, tidak semua pelaku usaha memiliki kemudahan dalam mengakses teknologi atau memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dunia digital, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Dari sisi strategi pengembangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, diversifikasi produk, inovasi, serta penguatan ekosistem kreatif yang melibatkan kolaborasi antara UMKM, desainer, dan pelaku industri kreatif lainnya menjadi kunci keberhasilan transformasi digital. Pemerintah juga perlu membangun platform promosi digital yang kuat dan mendorong partisipasi UMKM dalam pameran lokal maupun internasional untuk memperluas jaringan dan pasar.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital UMKM di Labuan Bajo sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan pelaku UMKM itu sendiri. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Labuan Bajo di kancah global.

REFERENCES

Daftar pustaka memakai gaya American Psychological Association (APA) (zotero/mendelay)

- Fauzan, M. 2025. *STATISTIK PERKEMBANGAN UMKM INDONESIA 2018-2023*. Laporan Statistik UMKM.
- Hamid. (2024, 8 Mei). *Sejak Agustus 2021 hingga Mei 2024, 4.642 PELAKU USAHA DI MANGGARAI BARAT DAFTAR LEWAT OSS. LABUAN BAJO*
- Nashir, M. M., Prasetyo, B. A., & Muhibban. (2025). *PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM TRANSFORMASI BISNIS UMKM DAERAH DEPOK*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3(1).
- Ekaputra, P. S., & Ciptosari, F. (2024). *ADOPSI TEKNOLOGI PEMBAYARAN DIGITAL QRIS DI KALANGAN UMKM LABUAN BAJO: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Akademisi Vokasi, 3(2), 1-13.
- Adamy, Z., Wiradharma, G., Prasetyo, M. A., Soko, I. P., & Igiriza, M. (2025). *STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS LABUAN BAJO DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI LOKAL*. SIBATIK JOURNAL, 4(4).
- Astuti, E. D., & Rosita, R. (2024). *PENTINGNYA TRANSFORMASI DIGITAL UMKM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI INDONESIA*. SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen, 2(4), 119–134.
- Pratamansyah, S. R. (2024). *TRANSFORMASI DIGITAL DAN PERTUMBUHAN UMKM: ANALISIS DAMPAK TEKNOLOGI PADA KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA*. Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan, 2(2).
- Fathoni, I., & Asfiah, N. (2024). *TRANSFORMASI DIGITAL BISNIS UMKM DI INDONESIA SETELAH MASA PANDEMI*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 10219-10236.
- Berliandal Do, M., Kartika, D., & Rekan. (2023). *PERAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN MODEL BISNIS UMKM DI ERA DIGITAL*. Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, 2(4), 180–189.
- Pradana, R. A., et al. (2024). *TRANSFORMASI DIGITAL UMKM INDONESIA DI ERA INDUSTRI 5.0: STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH*. Jurnal Manajemen dan Teknologi, 10(1), 1-15.
- Yuliani, & Priyanto. (2022). *PERAN REGULASI DAN INSENTIF PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPERCEPAT ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL OLEH UMKM*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(11).
- Surya Ryan Pratamansyah (2024) *TRANSFORMASI DIGITAL DAN PERTUMBUHAN UMKM: ANALISIS DAMPAK TEKNOLOGI PADA KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Bahasoan, A. N., Nur Qamariah, S., Wahdaniah, Indayani, B., & Maghfirah Sari Azis. (2024). *TRANSFORMASI DIGITAL PADA UMKM: PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INKLUSI DI NEGARA BERKEMBANG*. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 5(1), 9–19.
- Insani, I., dkk. (2023). *PELATIHAN DIGITALISASI DAN LITERASI UMKM*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Putri, I., dkk. (2023). *TRANSFORMASI DIGITAL DALAM KEWIRAUSAHAAN: ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL*. Simetris: Jurnal Teknik Mesin.
- Nashir, M. M., et al. (2025). *PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM TRANSFORMASI BISNIS UMKM DAERAH DEPOK*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3(1), 769–785.
- Laziva, N., & Atieq, M. Q. (2024). *STUDI LITERATUR DIGITALISASI UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) DI ERA MASYARAKAT 5.0: STRATEGI DAN FAKTOR*. Manajemen Bisnis dan Inovasi Cipta, 7(1).